

Masyarakat Sipil dan Demokratisasi Politik di Malaysia: Satu Analisis Ringkas

Md. Salleh Md. Said ^a

Mohammad Agus Yusoff ^b

Leo Agustino ^c

Abstrak

There is no pro democracy participant in Malaysia carrying impact of the system of otoritarian. Politicians or political elite not success to change develop to be better in Malaysia. Nevertheless, civil citizen always doing the best to balance on action and decision of government in order to realize democraton in Malaysia.

Keyword: Civil Society, Democraton, Politic.

Tidak berjalannya para partisipan pro demokrasi telah menjadikan Malaysia terus dikuasai oleh rezim otoriter. Kegagalan dalam menyadarkan para elit politik tentang demokrasi menjadi hal yang signifikan untuk membawa Malaysia dalam wajah demokrasi. Namun, meski demikian, masyarakat sipil terus mengimbangi tindakan dan keputusan pemerintah agar membawa Malaysia ke dalam negara demokratis.

Keywords: Masyarakat sipil, Demokrasi, Politik

PENDAHULUAN

Analisis makalah ini bertujuan untuk menelaah dinamika politik ‘suara dari bawah’ yang diwakili oleh masyarakat sipil di Malaysia dan impaknya terhadap proses demokratisasi di negara berkenaan. Argumentasi utama analisis makalah ini adalah proses demokratisasi di Malaysia berhasil dilaksanakan — dalam kadar tertentu — hasil dari peran yang dimainkan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Peran masyarakat sipil tersebut antaranya meliputi perantara, pendorong, pembela, oposisional dan penyokong dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan merujuk Huntington (1991b), proses demokratisasi bisa berlaku dalam tiga jalan yaitu *transformation*

(transformasi), *replacement* (penggantian) dan *transplacement*. Dalam konteks Malaysia, ketiga proses demokratisasi di atas tidak mengikuti arah manapun. Ini karena demokrasi belumlah wujud di negara tersebut. Meski begitu, dorongan ke arah demokratisasi telah berlangsung. Misalnya dalam upaya *transplacement*, demokratisasi dapat dilihat dalam kes Tengku Razaleigh Hamzah bertanding melawan Dr Mahathir untuk merebut posisi Presiden UMNO pada tahun 1987 dan dalam kes *replacement*, demokratisasi hampir terjadi pada tahun 1998 ketika Anwar menantang kekuasaan Dr. Mahathir dengan melancarkan gerakan reformasi setelah dipecat dari posisinya sebagai wakil Perdana Menteri dan wakil Presiden UMNO.

^a Kandidat PhD di Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, Malaysia.

^b Profesor Madya dalam bidang sains politik di Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi (PPSPS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia. Saat ini menjabat ketua program sains politik pada PPSPS, UKM. E-mail: agus@ukm.my

^c Dosen pada Program Sains Politik di Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi (PPSPS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia. E-mail: leagustino@gmail.com

Oleh karena itu, dengan menggunakan ketiga konsep di atas, kajian ini menengok beberapa persoalan penting untuk, yaitu: mengapa munculnya gelombang protes rakyat pada tahun 1997-1998; siapakah aktor di balik gerakan protes tersebut; apakah terdapat hubungan antara berlakunya protes rakyat dengan masyarakat sipil di Malaysia; bagaimanakah implikasi gerakan protes itu terhadap hasil pemilihan umum pada tahun 1999, 2004 dan 2008 di Malaysia; dan sejauh manakah impak gerakan protes tersebut ke atas demokratisasi politik di Malaysia? Berangkat dari pemahaman ini, analisis makalah ini berusaha untuk menjelaskan dan menilai peranan masyarakat sipil dan proses demokratisasi di Malaysia dengan susunan seperti tertuang di atas.

KEBIJAKAN PUBLIK PADA ZAMAN MAHATHIR, BADAWI DAN NAJIB

Sebelum menjawab persoalan yang dibentangkan dalam bagian sebelum ini, makalah ini akan menganalisis secara singkat mengenai peranan 'suara dari bawah' yang diwakili oleh masyarakat sipil dalam melakukan proses demokratisasi di Malaysia. Paling tidak ada empat hal yang patut dituliskan dalam bagian awal ini.

Pertama, politik Malaysia sebelum konflik etnik pada Mei 1969 adalah politik yang stabil.¹

¹ Konflik atau Kerusuhan etnik pada bulan Mei diawali oleh kekalahan Partai Perikatan (yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC) pada pemilihan umum tahun 1969. Jumlah kursi yang Partai Perikatan dalam parlemen ketika itu menurun dari 89 kursi pada tahun 1964 menjadi 66 kursi pada tahun 1969. Partai Perikatan telah kehilangan majoriti T¹ dalam Dewan Rakyat. Sedangkan, Partai Gerakan Rakyat Malaysia, Democratic Action Party (DAP) dan People Progressive Party (PPP) menang 25 kursi dan PAS 12 kursi. Kemenangan ini dimeriahkan oleh arak-arakan pihak oposisi. Tetapi selama perarakan tersebut mereka membangkitkan persoalan sensitif yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan (bahasa Melayu), kedudukan istimewa orang Melayu sebagai Bumiputera dan hak kerakyatan orang non-Melayu. Hal ini telah menimbulkan perasaan syak wasangka antara kelompok peribumi dan pendatang, khususnya Cina. Namun merujuk

Sebab, kerjasama antarkaum di Malaysia ketika itu berjalan dengan baik yang bertunjangkan sikap saling harga menghargai. Namun setelah konflik antaretnik terjadi pada Mei 1969, skenario politik berubah ketika parlemen digantung dan Undang-undang mengenai hasutan (Akta Hasutan) diamandemen untuk mengawal rakyat agar tidak menimbulkan isu sensitif yang dapat menggugat keamanan dan ketertiban negara. Selain itu, untuk mengukuhkan semangat perpaduan antaretnik dan semangat mencintai negara, Rukun negara diperkenalkan.² Konflik ini secara umumnya dipahami sebagai akibat dari ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendistribusikan sumber ekonomi yang adil kepada semua etnik, pemerintah Malaysia memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Baru (KEB, *New Economy Policy* (NEP)).

Pada awal pelaksanaannya, KEB adalah satu program pemerintah yang dapat dikatakan berhasil. Namun setelah beberapa tahun berjalan, akibat implementasi yang hanya mengutamakan

beberapa kajian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan tersebut. Pertama, konspirasi politik yang dimainkan oleh Partai Komunis Malaya (PKM) untuk merampas kekuasaan dari pemerintah berkuasa. Dalam konteks ini PKM menggerakkan pemuda Cina untuk menantang ketuanan Melayu setelah pemilihan umum tahun 1969 yang akhirnya dilawan oleh etnik Melayu dan berakhir dengan pertumpahan darah. Kedua, kerusuhan terjadi sebagai bentuk protes atas ketimpangan sosioekonomi antara etnik Melayu dan Cina yang menyebabkan kecemburuan sosial. Bukan hanya kecemburuan yang memicu pecahnya tragedi, tetapi perilaku etnik Cina yang mulai mempermasalahkan ketuanan dan keistimewaan orang Melayu. Ketiga, dinyatakan bahwa tragedi tersebut sebagai upaya perebutan kuasa yang dilakukan oleh para pemimpin sakit hati dalam UMNO terhadap kepemimpinan yang berkuasa.

² Rukunegara adalah sebuah ideologi nasional yang bertujuan untuk menyatukan kembali masyarakat Malaysia yang beragam etnik. Rukunegara mempunyai lima prinsip utama, yaitu: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan—yang mempunyai visi untuk menciptakan tujuan bersama dan rasa memiliki kepada satu bangsa.

perpaduan etnik. Malah yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi rakyat, masyarakat nonMelayu merasa menjadi warganegara kelas dua dan lainnya. Justru itulah, diktum Lord Acton 100 tahun lampau (menyangkut hal ini) menjadi benar, yaitu *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*.

Selain itu, analisis sarjana sebelum ini berargumen bahwa politik Malaysia di bawah pemerintahan Dr. Mahathir telah berhasil membawa perubahan dan pembangunan ekonomi yang pesat bagi Malaysia karena kemampuannya untuk menjaga stabilitas politik. Berbeda dengan uraian sebelum ini, hasil analisis makalah ini juga mendedahkan politik Malaysia di bawah Dr. Mahathir telah berubah dari *consociational politics* kepada *UMNO dominated*. Argumen seperti ini dilandasi atas kebijakan-kebijakan Malaysia di bawah Dr. Mahathir tidak lagi menunjukkan ciri-ciri konsosiasional demokrasi karena munculnya hegemoni UMNO dalam memformulasi kebijakan negara. Dalam konteks tersebut, kebijakan negara dibuat oleh elit politik UMNO saja, sedangkan pemimpin-pemimpin lain dalam BN hanya mengesahkan apa yang dikehendaki oleh UMNO. Hal ini dianggap umum pada zaman Dr. Mahathir berkuasa. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya 'ruang' dialog yang setara antara elit-elit dalam BN sehingga menciptakan ketimpangan kekuasaan yang mengakibatkan berlakunya *primus inter pares* UMNO dalam BN.

Kajian dan analisis politik Malaysia sebelum ini juga—seperti yang dilakukan oleh Hilley (2001), Cheah Boon Kheng (2002), Case (2004) dan Pepinsky (2009)—menyatakan protes politik rakyat terhadap pemerintah hanya bermula di zaman Dr. Mahathir dan terus berlaku hingga zaman sekarang ini. Analisis makalah ini berbeda dengan temuan beberapa sarjana di atas. Kendati demikian, analisis makalah ini setuju bahwa zaman pemerintahan Dr. Mahathir adalah era berlakunya protes politik rakyat yang keras terhadap BN, namun protes ini bukanlah berawal pada zaman pemerintahannya, malah lebih awal dari itu, yaitu sejak orang Melayu melakukan protes terhadap

pembentukan Malayan Union.⁵ Dalam konteks tersebut, Sultan Johor adalah sultan pertama yang memberikan tandatangan untuk menyetujui rekomendasi Inggris memperkenalkan idea Malayan Union. Tindakan Sultan Johor ini bukan saja mengundang protes rakyat, tetapi juga sekelompok pegawai senior di pemerintahan Johor yang berpendapat bahwa Sultan tidak berhak menyerahkan negara bagian Johor kepada Inggris. Protes rakyat di Johor didengar dan diterima sebagai pelajaran berharga oleh sultan-sultan lain dan kemudian memobilisasi rakyat masing-masing untuk menentang idea Malayan Union. Selain itu, beberapa koran Melayu (*Utusan Melayu* di Singapura, *Majlis* di Kuala Lumpur dan *Warta Negara* di Pulau Pinang) juga turut memainkan peran penting dalam menyebarkan protes politik rakyat untuk menolak idea Malayan Union. Munculnya protes masyarakat Melayu terhadap kebijakan idea Malayan Union Inggris tersebut adalah karena munculnya tentangan mereka kepada kebijakan tersebut yang memberikan taraf kerakyatan secara *jus soli* kepada etnik nonMelayu pendatang, dan juga menentang pengurangan kekuasaan raja-raja Melayu yang menjadi simbol kedaulatan orang Melayu.

Di samping itu, protes politik juga berlangsung setelah tragedi pada 13 Mei 1969. Protes ini berawal setelah Dr. Mahathir menulis surat kepada tunku yang isinya mengkritik pemerintahan beliau yang lemah dan terlalu tunduk kepada pemimpin nonMelayu. Akibatnya, Tunku memecat keanggotaan Dr. Mahathir dari UMNO. Pemecatan Dr. Mahathir ini mencetuskan protes rakyat secara terbuka terhadap Tunku. Protes sebegini tidak pernah

⁵ Malayan Union ialah semua negeri-negeri Melayu dan negeri Selat selain Singapura diletakkan di bawah satu pemerintahan, kewarganegaraan yang sama bagi semua pihak (pribumi maupun pendatang); dan memberikan dengan otomatis taraf warganegara kepada orang-orang Cina dan India yang lahir di Tanah Melayu; semua kekuasaan dan hak sultan-sultan atas negeri-negeri mereka masing-masing diserahkan kepada mahkota Inggris; dan sultan-sultan hanya akan menjadi pengurus bagi Majelis Penasehat yang mempunyai kemampuan dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu saja.

berlaku sebelumnya sebab budaya Melayu melarang hal itu. Tetapi dengan berlakunya peristiwa Mei 1969 dan Dr. Mahathir dipecat dari UMNO, banyak akademisi dan mahasiswa yang menuntut Tunku bertanggungjawab atas tragedi tersebut. Protes ini terjadi pada bulan Juli dan berlangsung terus hingga bulan Agustus 1969. 'Suara dari bawah' pada tahun tersebut menginginkan Tunku meletakkan jabatannya karena beliau dianggap tidak mampu mengurus pemerintah.

Merujuk pada uraian di atas, analisis makalah ini berbeda dengan perbincangan yang telah dilakukan oleh O'Donnell & Schmitter (1986) yang menyatakan masyarakat sipil terbentuk setelah proses demokratisasi. Sebaliknya, analisis makalah ini justru mendeskripsikan masyarakat sipil tidak terbentuk setelah proses demokratisasi, tetapi terbentuk sebelum proses demokratisasi itu sendiri. Argumen tersebut tidak sejalan dengan uraian makalah ini, sebab apabila masyarakat sipil tumbuh dan berkembang hanya selepas proses pendemokrasian, maka tidak akan ada satu kelompok masyarakat sipil pun yang melahirkan dan mendorong proses demokratisasi. Analisis makalah ini menunjukkan sejak idea Malayan Union digagas oleh Inggris proses demokratisasi telah berlaku, meski belum berhasil seperti yang diinginkan oleh banyak rakyat Malaysia.

Protes politik lain juga turut berlaku selepas tragedi 1969, terutamanya apabila KEB dilaksanakan. KEB yang bertujuan mencapai perpaduan nasional melalui pengentasan kemiskinan tanpa melihat perbezaan etnik juga menghadirkan sisi negatifnya yakni mencetuskan ketimpangan sosioekonomi baru. Ketimpangan ini dapat dilihat apabila setengah orang menjadi begitu kaya dengan KEB dan sebagian rakyat lainnya tetap miskin sehingga tidak mampu membeli makanan. Hasilnya ketimpangan baru ini disebabkan oleh distribusi ekonomi yang dirancang melalui KEB hanya menguntungkan kroni elit berkuasa saja dan ini menimbulkan protes serta kemarahan rakyat. Salah satu protes yang terkenal ialah demonstrasi Baling yang diadakan oleh Persatuan Mahasiswa Universiti

Malaya (University of Malaya Student' Union, UMSU) pada November 1974.⁶ Salah satu faktor yang mendorong mahasiswa menunjuk perasaan adalah karena mereka menentang DEB yang bersifat diskriminatif dan tidak mengorientasikan kepada pembangunan luar kota, khususnya kelompok petani.

Satu lagi protes masyarakat sipil yang berlaku sebelum pemerintahan Dr. Mahathir ialah protes etnik Cina terhadap pelembaran Akta Koordinasi Industri (AKI) pada tahun 1975—protes dikordinasikan oleh ACCCIM. Masyarakat Cina memprotes undang-undang ini karena AKI mewajibkan para industriawan mengambil sekurang-kurangnya 30% pekerja dari etnik Melayu baik itu buruh maupun manajemen.⁷ Selain itu, setiap firma yang hendak mendaftarkan perusahaannya di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) mesti menawarkan sekurang-kurangnya 30% sahamnya kepada kaum Bumiputera (dalam hal ini Melayu). Sekiranya perusahaan tidak memenuhi syarat ini,

⁶ Meledaknya peristiwa Baling pada tahun 1974 diawali oleh arak-arakan petani miskin Baling pada 22 dan 25 November 1974 yang memprotes kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari dan kejatuhan harga karet yang mereka hasilkan. Mereka mengkritik pemerintah sebab beberapa orang anak petani meninggal akibat kemiskinan yang akut. Kabarnya, anak-anak itu keracunan setelah memakan ubi kayu yang tidak dicuci dengan bersih, karena ibu bapak mereka kekurangan uang untuk membeli makanan yang bersih dan layak.

⁷ Untuk menghindari hal ini banyak pengusaha Cina yang kemudian mengambil langkah memindahkan kantor operasionalnya dan mengalihkan sebagian besar modal mereka ke luar negeri, akibatnya modal yang meninggalkan Malaysia antara tahun 1976 hingga tahun 1985 berjumlah AS\$12 bilion. Reaksi ini ditunjukkan oleh hengkangnya United Malayan Banking Corporation (UMBC) dan Faber Merlin yang didirikan oleh Chang Ming Thien pindah ke Hong Kong. Demikian pula dengan Kuok Brothers Bhd. milik Robert Kuok memindahkan modalnya dan membuka perusahaan baru di Hong Kong untuk menghindari kerugian akibat akta tersebut. Selain itu, banyak usahawan Cina menggunakan nama anggota keluarga mereka untuk memecah perusahaan besar mereka menjadi banyak perusahaan kecil.

maka ijin usahanya bisa dicabut oleh pemerintah. Protes terjadi karena undang-undang ini dianggap menyusahkan usahawan Cina, sebab usahanya (sebenarnya) hanya mengutamakan para anggota keluarganya saja.

Selain protes yang dinyatakan di atas, banyak lagi protes lain yang tercetus sebelum Dr. Mahathir berkuasa, tetapi tidak dibahas dalam makalah ini karena skopnya yang terlalu luas. Pun begitu, satu yang berbeda dari perjuangan masyarakat sipil ini ialah bentuk atau kaedah perjuangan yang digunakan antara zaman sebelum Dr. Mahathir dan sesudahnya, yaitu perjuangan masyarakat sipil pada zaman Dr. Mahathir lebih tersusun berbanding dengan zaman sebelumnya. Ini dapat dibuktikan dengan kemunculan masyarakat sipil pada tahun 1983 sewaktu amendemen undang-undang untuk mengurangi kekuasaan raja dalam memberi perkenan kepada rancangan undang-undang, pada tahun 1987 ketika terjadi persaingan sengit antara Dr Mahathir dan Ku Li dalam merebut kursi Presiden UMNO, pada tahun 1993 ketika Dr. Mahathir mengamandemen undang-undang untuk menghapuskan imunitas raja-raja, pada tahun 1997 semasa terjadi krisis keuangan dan pada tahun 1998 apabila Anwar Ibrahim dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri dan Wakil Presiden UMNO.

Merujuk pada segi faktor munculnya protes dan berdasar pada kajian sarjana sebelum ini umumnya terjadi karena dua sebab. Pertama, karena pertentangan antara orang Melayu dan nonMelayu sehingga memunculkan isu etnik. Seperti mana yang ditegaskan oleh Ratnam (1965), Vasil (1980) dan Jesudason (1989), kemajemukan etnik yang disebabkan peninggalan penjajah Inggris sangat susah disatukan karena perbedaan adat budaya antara ketiga etnik besar di Malaysia (Melayu, Cina dan India).⁸ Justru itulah, isu nonMelayu sebagai

⁸ Hal ini dimungkinkan karena pengaruh dari kebijakan penjajah Inggris yang membawa masuk pekerja ladang dan perusahaan dari India dan China pada akhir abad ke-19 untuk memenuhi tuntutan buruh pada waktu itu. Pengaruh kedatangan buruh ini menghasilkan kelompok yang berbeda menurut

pendatang dan isu Melayu (sebagai pribumi) mendapat kedudukan istimewa dan kerap mewarnai politik Malaysia yang menyebabkan hadimya ketegangan-ketegangan politik. Kedua, karena jurang ekonomi antara orang kaya dan miskin serta antara kota dan luar kota yang semakin timpang menyebabkan munculnya pertentangan kelas. Ini bisa dilihat dalam analisis Cham (1975), Jomo (1986) dan Gomez (1999). Berbeda dengan penemuan sebelumnya, makalah ini melihat protes politik baik sebelum ataupun setelah Dr. Mahathir berkuasa bukanlah disebabkan oleh pertentangan kaum atau kelas, tetapi karena kegagalan pemerintah dalam mengurus isu-isu yang besar sifatnya seperti isu keadilan, korupsi, sistem kehakiman, rusaknya institusi pemerintah oleh perilaku birokrat yang rakus ekuasaan, distribusi ekonomi yang tidak merata, biaya hidup yang meningkat dan pelanggaran hak asasi rakyat.

Walaupun uraian makalah ini mempunyai sedikit persamaan dengan analisis Hilley (2001), Brown (2004), Weiss (2006) dan Pepinsky (2009) dari segi protes politik masyarakat sipil terhadap pemerintah khususnya dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan dan penistaan hak asasi manusia; tetapi satu yang tidak dibahas oleh sarjana di atas ialah lahirnya kesadaran masyarakat sipil untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip demokrasi yang sejati. Ketiga sarjana di atas luput membahas pentingnya kesadaran dalam membangun gerakan politik, sebaliknya analisis ini menggariskan bahwa masyarakat sipil dan partai oposisi di Malaysia mempunyai kesadaran penuh keika mereka berjuang menegakkan nilai dan prinsip demokrasi. Ini misalnya ditunjukkan dengan meleburnya politik etnik dalam Barisan Alternatif (BA) pada tahun 1998 yang mempunyai satu visi yaitu melaksanakan demokratisasi secara bersama-sama dan saling bahu-membahu.⁹

negara yang ditepati dari segi taraf ekonomi, pekerjaan dan tempat tinggal.

⁹ BA merupakan gabungan antara Partai Islam seMalaysia (PAS), Partai Aksi Demokratik (DAP) (yang mayoritasnya dianggotai etnik Cina Malaysia), Partai Rakyat Malaysia (PRM) dan Keadilan yang tidak saja memperjuangkan

Hasil analisis di atas juga mendeskripsikan hingga sebelum pemerintahan Dr. Mahathir, biarpun partai-partai oposisi lantang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, namun mereka belum berdaya untuk memengaruhi formulasi kebijakan publik. Realitas ini menunjukkan partai-partai oposisi berada dalam dilema *futility of opposition*. Kegagalan partai-partai politik, khususnya partai oposisi, untuk berperan sebagai ‘penyambung lidah’, pelindung hak dan kepentingan rakyat konstitutennya telah mendorong munculnya gerakan masyarakat sipil dan NGO untuk mengambil alih peranan tersebut. Persoalannya, berjayakah perjuangan NGO yang mewakili suara rakyat bawah ini menarik perhatian pemerintah untuk menghadirkan sebuah rejim politik yang demokratik di Malaysia? Ini yang dibahas dalam bagian seterusnya.

PROSES DEMOKRATISASI: AKHIR DARI SEBUAH AWAL?

Dalam bagian sebelumnya dibincangkan beberapa protes politik yang menggoncang politik Malaysia. Satu protes penting yang perlu diambil perhatian ialah protes masyarakat terhadap pemerintah dalam menghadapi krisis keuangan pada tahun 1997. Krisis ini perlu dirumuskan di sini karena efeknya yang menghadirkan kesempatan dan peluang politik bagi terbentuknya transformasi rejim politik di Malaysia. Ini karena krisis ekonomi selalu dianggap sebagai variabel penting yang boleh menggulingkan rejim otokratik berkuasa. Kajian Haggard & Kaufman (1995) misalnya menemukan bahawa dari 27 kasus transisi menuju demokrasi yang berlaku di berbagai-bagai negara pada periode 1970 hingga 1990, 23 kasus darinya selalu didahului oleh krisis ekonomi. Namun, dalam kasus Malaysia peluang tersebut gagal direalisasikan oleh masyarakat sipil

kepentingan satu etnik saja, tetapi memperjuangkan hak dan kepentingan yang bersifat kemanusiaan. Kecenderungan ini memperlihatkan wujudnya politik antaretnik atau multi etnik yang belum pernah berlaku sebelumnya, khususnya sesudah tragedi berdarah pada 13 Mei 1969.

dan partai-partai oposisi untuk merealisasikan demokratisasi.

Gagalnya masyarakat sipil di Malaysia tersebut disebabkan oleh kegagalan kelompok prodemokrasi untuk menyadarkan elit politik akan perlunya diterapkan nilai dan prinsip demokrasi di Malaysia. Di samping itu, kegagalan ini juga disebabkan terlalu kuatnya hegemoni politik rejim berkuasa terhadap *state of mind* elit-elit politik BN untuk menolak transformasi politik. Penemuan ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang berkata kegagalan masyarakat sipil disebabkan oleh rejim berkuasa berhasil mereorganisasi dirinya (Hilley 2001), masyarakat sipil kurang bersatu padu (Brown 2004) ataupun NGO gagal memanfaatkan krisis kewangan dan bangkitnya gerakan reformasi Anwar (Weiss 2006).

Walaupun Anwar Ibrahim sudah mencoba mengambil peluang—melalui krisis ekonomi tahun 1997-1998—dengan membentuk ‘politik baru’ dan membawa perubahan politik yang demokratik di Malaysia, namun Dr. Mahathir dan rejimnya tetap bertahan, bahkan tetap menang besar dalam Pemilu ke-10 yang diselenggarakan pada November 1999. Kemenangan ini dimungkinkan karena Dr. Mahathir bertindak efektif dalam memulihkan ekonomi dengan menolak untuk tunduk kepada kehendak IMF, menurunkan tingkat bunga pinjaman yang melegakan rakyat dan memastikan rakyat hidup nyaman dengan perut yang kenyang. Kemampuan Dr. Mahathir mengambil langkah strategik mengatasi krisis ekonomi ini menolak tesis Huntington (1991) yang menyatakan proses demokratisasi bisa berjalan apabila terjadi krisis ekonomi. Berkait dengan tuduhan bahwa Dr. Mahathir menjalankan kekuasaan secara hegemonik dan otokratik, argumen ini mudah dipatahkan karena jejak rekam menunjukkan rejim Mahathir tidak pernah melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap rakyatnya. Hal ini berbeda dengan rejim Soeharto di Indonesia, rejim Marcos di Filipina ataupun junta militer di Myanmar. Jadi, jikapun ada waktunya Dr. Mahathir bertindak keras terhadap kelompok masyarakat yang menentangnya, itu

disasarkan untuk menjaga keamanan dan kestabilan politik negara.

Memang benar rejim Mahathir membatasi kebebasan dan partisipasi politik rakyat, kebebasan media dan 'menahan' lawan politiknya, tetapi beliau tidak pernah melakukan tindakan kriminal (isasi) politik seperti yang biasa dilakukan oleh rejim otokratik atau rejim militer lainnya. Jika dilihat kepada rejim tentera di Indonesia dan Myanmar misalnya, mereka melakukan kriminal politik dan akibatnya mereka dijatuhkan oleh rakyat. Meskipun rejim Dr. Mahathir menumpuk kekuasaannya kepada pribadinya sendiri (dikenal dengan istilah *Manathirisme*), tetapi model kekuasaannya bukan sebuah kekuasaan politik yang berwajah sama dengan rejim Soeharto, Marcos, Mubarak ataupun lainnya. Perbeadaan antara rejim Dr. Mahathir dengan Soeharto sangat ketara, misalnya, Dr. Mahathir tahu menjaga 'perut' rakyatnya supaya terus terisi, mengerti mengurus keperluan rakyat supaya nyaman, memahami bagaimana menyediakan pelbagai fasilitas agar rakyat tidak sengsara dan lain-lain. Oleh sebab itulah, rejim Dr. Mahathir tidak dilihat oleh rakyatnya sebagai rejim politik yang benar-benar diktator sebagaimana digembar-gemborkan oleh para penyokong prodemokrasi, sebaliknya kekuasaannya dilihat dan dikenal sebagai rejim politik yang paling efektif dan efisien sehingga dia meletakkan jabatannya sebagai PM. Justru itu, walaupun pada Pemilu tahun 1999 Anwar Ibrahim bersama masyarakat sipil membawa slogan perubahan dan reformasi untuk melakukan transformasi politik, namun rakyat tetap memilih BN daripada memilih Partai KeAdilan dan koalisi BA; sebab, BN di bawah kepemimpinan Dr. Mahathir dilihat lebih mampu menjaga kehidupan mereka.

Satu lagi argumen makalah ini yang tidak dibahas oleh sarjana sebelum ini tentang kegagalan reformasi pada tahun 1999 ialah tentang sikap dan pandangan elit politik terhadap Anwar Ibrahim, gerakan reformasi dan masyarakat sipil. Jika kajian yang amat otoritatif sebelum ini seperti yang dilakukan oleh Weiss (2006) dan Pepinsky (2009) menyatakan

reformasi tahun 1998 dan Pemilu 1999 gagal untuk memenangi hati rakyat disebabkan oleh faktor ketakutan akan berlakunya kerusuhan yang ganas seperti yang terjadi di Indonesia, dampak yang minim dari gerakan reformasi di tingkat lokal, pemilih pemula belum aktif memilih, orang Melayu dan nonMelayu masih menyokong BN dan lainnya, maka uraian makalah ini berargumen bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh mayoritas elit dan rakyat masih menganggap dan melihat Dr. Mahathir sebagai tokoh yang efektif dalam mengelola dan mengurus pemerintahan. Ini misalnya dapat ditunjukkan dengan kejayaan-kejayaan beliau dalam mengendalikan negara, memulihkan dan menyelesaikan krisis kewangan pada tahun 1998—berbanding cara yang dipilih Anwar. Meskipun Anwar telah memformulasi dan mengimplementasikan Paket Ekonomi Pertama pada 5 Desember 1997 dan Paket Ekonomi Kedua pada 24 Maret 1998—yang keduanya diarahkan menyelesaikan krisis, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya: krisis semakin bertambah parah.¹⁰ Ini berbeda dengan cara yang dibuat Dr. Mahathir melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) yang berhasil memulihkan krisis keuangan ketika itu. Malah tidak lama setelah itu, Dr. Mahathir (lagi-lagi berhasil) meresmikan

¹⁰ Paket ekonomi 5 Desember 1997 meliputi beberapa agenda, yaitu: (i) revisi proyeksi angka pertumbuhan tahun 1998 dari 7% menjadi 4-5% per tahun, (ii) pengurangan angka defisit anggaran berjalan dari 5% menjadi 3% dari GNP, (iii) memperketat belanja pemerintah pusat sebesar 18%, (iv) memberlakukan ketentuan lebih ketat bagi investor baru, (v) menghentikan mega projek yang tidak strategis dan prinsip, (vi) meningkatkan upaya regulasi dan ketransparanan dalam restrukturisasi badan usaha milik negara agar tidak terjadi *bail-out* tidak bermanfaat, dan (vii) semua gaji menteri dipotong 10%. Sedangkan paket ekonomi 24 Maret 1998, beberapa langkah dilakukan Anwar untuk membendung krisis yang semakin menjadi tak terkendali, antaranya: (i) mengoreksi sasaran angka pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 1998 menjadi 2-3%, lebih kecil dibandingkan angka pertumbuhan 4-5% yang diumumkan pada bulan Desember 1997 dan (ii) Bank Negara berencana memusatkan kegiatan pensihatan perbankan melalui konsolidasi dan *merger* 20 bank.

Menara Kembar Petronas yang menjadi simbol dari pulihnya ekonomi Malaysia.

Karena itulah, anggapan banyak sarjana bahwa Dr. Mahathir adalah pemimpin otokratik yang gagal perlu dinilai lagi. Sebab, jika Dr. Mahathir tidak berwibawa, tentunya golongan elit dan juga rakyat tidak dengan mudah akan memberi dukungan kepadanya. Justru sebaliknya mayoritas rakyat dan elit politik di Malaysia yang sudah merasa nyaman dengan keadaan sosioekonomi, mereka merasakan tidak perlu adanya perubahan politik seperti yang dikehendaki dan dituntut oleh Anwar Ibrahim. Di samping itu, Anwar Ibrahim dan kelompok masyarakat sipil prodemokrasi belum cukup kuat untuk meyakinkan mereka bahwa negara memerlukan transformasi politik, juga keadaan negara akan lebih baik jika kelompok ini pimpin.

Selain itu, proses demokratisasi melalui jalur *replacement* (pergantian) juga tidak berjalan. Berbeda dengan gerakan reformasi di Indonesia yang memiliki organisasi yang terkordinir dan metode perjuangan yang telah lama bergerak, masyarakat sipil dan NGO prodemokrasi di Malaysia hanya muncul secara tiba-tiba—jika tidak hendak mengatakan reaktif—saja sebagai reaksi dari pemecatan Anwar. Unjuk rasa mahasiswa dan massa antipemerintah tidak pernah membuat strategi dan langkah yang tersusun secara rapi sebelum pemecatan Anwar. Ini karena budaya kritis masyarakat sipil di Malaysia belum sematang seperti mana yang berkembang di Indonesia. Lantaran itulah, ketidaksiapan strategi dan organisasi gerakan masyarakat sipil pada tahun 1998 tidak boleh mengembangkan dukungan massa ke seluruh kota besar dan penting di Malaysia, melainkan hanya bertumpu di Kuala Lumpur saja. Selain itu, pengaruh pribadi pemimpin partai oposisi, masyarakat sipil dan Anwar Ibrahim yang terbatas terhadap elit-elit parti politik juga merupakan faktor penting yang menyebabkan tidak terjadinya proses demokratisasi seperti yang diharapkan.

Kegagalan menyebarkan idea demokrasi kepada elit politik dan orang Melayu secara umumnya disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, keberhasilan Dr. Mahathir menjaga 'perut' rakyat mendorong rakyat untuk tidak terlalu mengambil perhatian ke atas desakan masyarakat sipil untuk mencetuskan transformasi politik karena rakyat masih nyaman dengan kehidupan mereka. Kedua, kematangan pemikiran elit politik dan rakyat masih belum sampai ke tahap yang sepatutnya menyebabkan mereka dengan mudah dapat menerima kampanye pemerintah. Misalnya, pemerintah selalu menyatakan kemenangan oposisi menyebabkan tercetusnya kerusuhan karena partai-partai dalam koalisi BA adalah *marriage of convenience* saja, yaitu walaupun tidur sebantalan tetapi memiliki mimpi yang berbeda: etnik Cina Malaysia menakuti apabila mereka menyokong partai oposisi akan menyebabkan terbentuknya negara Islam, sebaliknya dan orang Melayu dikatakan akan mendurhaka ketuanan Melayunya jika tidak memilih UMNO. Kampanye-kampanye seperti inilah yang kemudiannya menggiring rakyat menjadi takut untuk membawa perubahan politik. Ketiga, waktu untuk menyebarkan nilai dan prinsip demokrasi yang terlalu sempit. Inilah yang menyebabkan *transplacement* gagal direalisasikan di Malaysia.

Dari hasil analisis di atas, maka penilaian yang dapat diberikan bahwa ketiga proses demokratisasi Huntington—*transformastion*, *replacement*, *transplacement*—tidak relevan dalam konteks Malaysia karena ketidakmampuan gerakan prodemokrasi untuk berkembang pada masa krisis berlaku. Aksi-aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh kelompok Anwar Ibrahim dan masyarakat sipil semakin lama bukan semakin besar, tetapi sebaliknya menjadi semakin kecil dilihat dari segi intensitas gerakan dan sokongannya. Hal ini dimungkinkan oleh beberapa faktor: pertama, kemampuan Dr. Mahathir mengatasi krisis ekonomi; kedua, tindakan menggunakan *coercive-administrative approach*; dan ketiga, keupayaannya menimbulkan kebimbangan banyak orang akan terjadinya kerusuhan besar seperti yang terjadi di Indonesia. Apalagi Malaysia memiliki sejarah kelam mengenai kerusuhan etnik—pada 13 Mei 1969.

Dari segi keberhasilan masyarakat sipil memainkan peran dalam mendorong proses demokratisasi di Malaysia, makalah ini mendedahkan peranan masyarakat sipil pasca Dr. Mahathir adalah lebih berkesan. Ini kerana kegagalan *cultural re-orientation* yang ditonjolkan oleh Abdullah Badawi. Meskipun pada awalnya rakyat sangat berharap kepadanya untuk melakukan transformasi dan reformasi pemerintahan ke arah yang demokratik, tetapi pada akhirnya pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, rakyat melihat janjinya sebagai sekadar retorik politik saja. Apalagi ketika Badawi berkuasa beban rakyat dan biaya hidup semakin bertambah tinggi sehingga membuat rakyat sulit dan marah. Lantaran pemerintah masih mengendalikan media massa, maka kesulitan rakyat tidak tergambarkan secara nyata. Melihat hal ini, kelompok masyarakat sipil dan partai pembangkang tidak tinggal diam. Mereka menggunakan media internet (ICT) untuk melawan penggelapan—jika tidak hendak mengatakan pemanipulasian—berita oleh media dukungan pemerintah dengan memberitakan informasi dan berita alternatif.

Kemunculan ICT sebagai alat perjuangan menghasilkan impak yang baik, terutama kepada masyarakat kelas menengah di Malaysia, mahasiswa, pemilih pemula, eksekutif muda, profesional, akademisi, aktivis dan lainnya. Ini boleh dilihat dari metode protes yang digunakan oleh mereka yang dulunya hanya menggunakan unjuk rasa, protes jalanan, berkumpul di lapangan, membakar ban, membuat papan penghalang di jalan-jalan raya dan lainnya, yang juga bisa disebut sebagai 'protes politik luar ruangan' (untuk membedakan dengan metode lainnya yang lebih baru), tetapi dengan munculnya ICT, metode protes telah berubah kepada 'protes politik dalam ruangan.' Kelebihan daripada 'protes politik dalam ruangan,' selain ia tidak perlu berhadapan langsung dengan polisi-polisi Malaysia, seperti yang terjadi pada 'protes politik luar ruangan,' ia juga memberi dampak positif terhadap golongan muda, mahasiswa, PNS, guru dan golongan kelas menengah di

Malaysia untuk turut serta menggunakan ICT untuk menyampaikan pemikiran mereka ataupun untuk mendapatkan informasi alternatif yang tidak disiarkan dalam media massa perdana. Dengan adanya informasi alternatif ini, maka kontennya dapat menimbulkan kesadaran rakyat akan pentingnya transisi ke arah demokrasi.

Analisis makalah ini memberikan sumbangan baru kerana mengemas istilah istilah siberdemokrasi yang terdengar terlalu 'Barat' dengan 'protes politik dalam ruangan.' Siberdemokrasi merupakan anitesis 'politik jalanan' (yang berlaku sebelum media internet dikenal secara luas). Dalam 'politik jalanan,' protes politik, tentangan terhadap kebijakan negara, unjuk rasa dan lainnya dilakukan di luar ruangan. Sebaliknya, 'protes politik luar ruangan' digunakan untuk merujuk kepada protes politik konvensional dan 'protes politik dalam ruangan' digunakan untuk merujuk kepada protes politik nonkonvensional. Dalam 'protes politik dalam ruangan,' setiap individu dapat melayangkan kritik, tentangan maupun dukungannya terhadap kebijakan negara dengan hanya berada di dalam rumah. Walaupun hanya sekadar berada di dalam rumah atau ruangan kantor, tetapi impak 'protes politik dalam ruangan' jauh lebih berpengaruh berbanding dengan 'protes politik luar ruangan.' Hal ini dapat dilihat dari keputusan pemilihan umum ketika tanpa penggunaan media internet yang luas pada Pemilu 1999, di mana gerakan reformasi Anwar tidak berhasil 'melahirkan' tsunami politik, tetapi pada Pemilu tahun 2008 ketika 'protes politik dalam ruangan' digunakan oleh masyarakat sipil dan partai pembangkang secara luas ia mencetuskan tsunami politik.

Keterpurukan pencapaian BN dalam Pemilu ke-12 tahun 2008 telah mencetuskan perpecahan di dalam UMNO. Abdullah Badawi dianggap tidak lagi mampu mengurus negara ke arah yang diharapkan rakyat dan (juga) UMNO. Dorongan dari pelbagai pihak termasuk Dr. Mahathir terhadap pengunduran diri Badawi begitu kuat, sehingga Badawi menunda Perhimpunan Agung UMNO tahun 2008 yang semestinya diselenggarakan dengan alasan mempersiapkan pasukan politiknya untuk

menghadapi Pemilu tahun 2008 menjadi setelah pemilihan umum. Untuk menunjukkan ketidakakurannya dengan Badawi, Dr. Mahathir menyatakan diri keluar dari UMNO. Bahkan selagi Badawi menjabat Presiden UMNO, Dr. Mahathir berjanji tidak akan pernah bersama partai tersebut. Akhirnya, transisi ke arah pelantikan Najib menjadi Presiden UMNO dan kemudiannya menjadi PM ke-6 Malaysia menjadi kenyataan pada 3 April 2009. Dengan disokong oleh banyak pihak—khususnya Dr. Mahathir, Najib kemudian memperkenalkan pelbagai kebijakan negara yang mengarah pada *economic re-orientation*. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan rakyat dengan membuat rakyat merasa nyaman dan makmur seperti sedia kala.

Ketika Badawi masih menduduki kursi PM, beberapa PRK yang diadakan setelah Pemilu tahun 2008 menunjukkan kekalahan koalisi Barisan Nasional. Biar begitu, ketika Najib menerajui koalisi ini, beberapa PRK mulai dari Bagan Pinang, Hulu Selangor, Batu Sapi, Galas dan Tenang semuanya dimenangi oleh BN. Keadaan ini, paling tidak menunjukkan rakyat telah kembali ke 'pangkuan' BN karena mereka percaya kepada pemerintahan Najib yang dianggap memiliki perencanaan untuk memajukan negara yang jelas. Meskipun beberapa kelompok masyarakat sipil dan partai pembangkang terus melakukan protes, tetapi data PRK menunjukkan rakyat telah berada di belakang UMNO lagi. Berbeda dengan kajian terdahulu seperti Abdul Kadir Jasin (2009), Mujahid Yusof (2009), Zulkifli Sulong (2009) dan lainnya, yang pada umumnya menyatakan tsunami politik akan terus berlanjut dan mengerdilkan UMNO dan juga BN, penulis melihat sebaliknya. Makalah ini justru menunjukkan kemampuan Najib membangun 'puing-puing' reruntuhan UMNO setelah diterjang oleh tsunami politik yang maha kuat pada Pemilu 2008 sangat berhasil.

Mengikuti seluruh argumen yang dibentangkan, maka dapat disimpulkan bahawa gerakan masyarakat sipil belum berhasil sepenuhnya untuk membawa proses

pendemokrasian di Malaysia. Walaupun begitu, setidaknya dengan lahir dan wujudnya protes politik yang dimulai dari bawah, penulis telah menunjukkan hal ini berhasil mendorong pemerintah untuk mengubah cara kerjanya. Dalam arti kata lain, analisis makalah ini berargumen bahwa masyarakat sipil turut mendorong proses demokratisasi di Malaysia dan perannya adalah *conditio sine qua non* untuk melaksanakan demokrasi itu sendiri. Selain itu, terdapat hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat sipil; di mana negara berusaha untuk mendominasi (juga menghegemoni) kelompok masyarakat sipil, sebaliknya kelompok ini justru coba memaksa negara untuk melakukan kompromi dan menerima tuntutan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan pembebasan Anwar Ibrahim ketika Abdullah Badawi berkuasa; dan pembebasan tahanan ISA serta penerbitan kembali *Harakah* dan *Suara Keadilan* pada masa awal Najib Razak memerintah. Ketiga hal ini mengilustrasikan keinginan rejim yang memerintah untuk berlaku demokratik karena terdorong oleh adanya protes yang terus-menerus dari kelompok masyarakat sipil yang menuntut perubahan. Walaupun politik yang ada pada hari ini belum benar-benar berubah, paling tidak sekurang-kurangnya masyarakat sipil di Malaysia telah (berjaya) mendorong politik negara yang hegemonik dan otokratik kepada sistem politik yang lebih demokratik—yang mau menerima kritikan dan saran dari rakyatnya.

PENUTUP

Makalah ini telah mendeskripsikan dan menilai perjalanan serta transformasi politik di Malaysia. Hasil analisisnya menggariskan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi konsosiasional sesuai dengan model yang diteorikan oleh Lijphart. Namun, demokrasi konsosiasional tersebut telah melalui beberapa proses penyelewengan dari ciri-ciri sejatinya yang telah digariskan oleh Lijphart. Penyelewengan inilah yang menyebabkan demokrasi di Malaysia menjadi terbatas. Makalah ini juga telah menunjukkan

keterbatasan demokrasi ini bermula dari pembatasan media, penyekatan kebebasan dalam berkumpul, pengawasan terhadap gerakan mahasiswa, pengawalan ke atas kebebasan hak asasi manusia, tingkat korupsi yang terus meningkat, pengendalian pilihan raya yang *free but not fair* dan banyak lagi. Maka, mengikut temuan ini politik Malaysia tidaklah dapat dikatakan semu-, quasi-, statis-, koersif-, hegemoni-, atau autoritarian demokrasi dan lainnya, tetapi *restricted democracy*.

Makalah ini berargumen demikian karena hasil perbincangannya telah membuktikan pemerintah Malaysia memberikan (sistem) demokrasi itu kepada rakyat, tetapi dalam kadar yang terbatas. Keterbatasan ini pada konteks pemerintah perlu terutama jika dipahami dalam konteks negara majemuk serta untuk menciptakan kestabilan politik bagi membangun dan meratakan distribusi ekonomi yang amat diperlukan oleh rakyat. Satu yang menarik dari analisis ini ialah dengan keterbatasan inilah kajian ini telah menunjukkan masyarakat sipil masih memainkan perannya untuk mengawal dan mengimbangi tindakan dan keputusan pemerintah supaya sekatan dan keterbatasan boleh dibuka untuk membawa transformasi politik Malaysia ke arah demokratik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Jasin, 2009, *Komedi & tragedy: politik mutakhir Malaysia*, Kuala Lumpur: Berita Publihing.
- Brown, G.K, 2004, Civil society and social movements in an ethnically divided society: the case of Malaysia, 1981-2001. Tesis PhD. University of Nottingham.
- Case, W, 2004, Testing Malaysia's pseudo-democracy. Dlm. Edmund Terence Gomez (pnyt.). *The state of Malaysia: ethnicity, equity and reform*, 29-48, London: RoutledgeCurzon.
- Cham, B.N, 1975, Class and communal conflict in Malaysia, *Journal of Contemporary Asia* 5(4): 446-461.
- Cheah Boon Kheng, 2002, *Malaysia: the making of a nation*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Gomez, E.T, 1999, *Chinese business in Malaysia: accumulation, accomodation and ascendance*, Surrey: Curzon Press.
- Haggard, S. & Kaufman, R.R, 1995, *The political economy of democratic transitions*, Princeton: Princeton University Press.
- Hilley, J, 2001, *Malaysia: Mahathirism, hegemony and the new opposition*, London: Zed Books.
- Huntington, S.P, 1991, *The third wave: democratization in the late twentieth century*, Oklahoma: Oklahoma University Press.
- Jesudason, J.V, 1989, *Ethnicity and the economy: the state, Chinese business, and the multinationals in Malaysia*, Singapore: Oxford University Press.
- Jomo, K.S, 1986, *A question of class: capital, the state and uneven development in Malaya*, Singapore: Oxford University Press.
- Mujahid Yusof, 2009, *Wajah baru politik Malaysia*, Petaling Jaya: Anbakri Publika.
- O'Donnell, G., & Schmitter, P, 1986, *Transition from authoritarian rule: tentative conclusion about uncertain democracies*, Baltimore: John Hopkins University Press.
- Pepinsky, T.B, 2009, *Economic crises and the breakdown of authoritarian regimes: Indonesia and Malaysia in comparative perspective*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ratnam, K.J, 1965, *Communalism and the political process in Malaya*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Vasil, R.K, 1980, *Ethnic politics in Malaysia*, New Delhi: Radiant.
- Weiss, M.L, 2006, *Protest and possibilities: civil society and coalitions for political change in Malaysia*, Stanford: Stanford University Press.
- Zulkifli Sulong, 2009, *Politik abad ke-21: perubahan ataupun harapan palsu*, Petaling Jaya: The Malaysian Insider.